

**Judul** : Laporan Kekayaan Pejabat : Nasdem Paling Rajin Gerindra Paling Malas  
**Tanggal** : Selasa, 09 April 2019  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 1 & 9



## Jika Begini Siapa Yang Sebenarnya Perkosa Ibu Pertiwi

**Nasdem Paling**  
... DARI HALAMAN 1

Demokrat menyusul di peringkat ketiga terendah, dengan persentase pelaporan LHKPN 57,38 persen. Dari 61 anggota DPR Demokrat, hanya 35 orang yang sudah melapor, 26 sisanya belum.

Yang paling rajin adalah Nasdem. Presentase kepatuhan LHKPN-nya tertinggi, 88,89 persen. Dari 36 anggotanya, 32 di antaranya sudah lapor. Menyusul di peringkat kedua dan ketiga fraksi dengan presentase kepatuhan LHKPN tertinggi yakni PPP sebesar 81,58 persen dan PKB 74 persen. Kemudian berturut-turut setelahnya: PKS 66,67 persen, PDIP 66,67 persen, Golkar 65,12 persen, dan PAN 60,87 persen.

Diingatkan Pahala, kepatuhan ang-

gota legislatif lapor LHKPN menjadi salah satu instrumen penting yang bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih di Pemilu 2019. Apalagi, sebagian besar anggota legislatif petahana akan mencalonkan diri kembali.

Warganet riuh menanggapi ini. Di Twitter, netizen mem-bully habis Gerindra. Pemilik akun @inggitababel nyindir kepada Prabowo. "Sesuai instruksi ketua umum (capresnya) korupsi dikit gak apa, kalau bertobat dikasih pensiun 5 persen dari korupsi," kicaunya disambut @nawey19. "Katanya yang memperkosa ibu pertiwi partisipan 01, ndak tahunya 02 paling banyak versi KPK... Hayuuu mikir!!!"

Netizen lainnya melancarkan kritikan, seperti akun @fookyeahs. "Ini sih udah bersebrangan dengan semangat memberantas korupsi namanya @Gerindra," kicaunya dibalas @NaiyaSup-

port. "Cor bocor. Terendah."

Akun @PradanaBhakti menyindir keras. "Ndasmu! Capres peninggalan rezim korup Orba. Partai gak jelas dapat kekayaan dari mana. Anggotanya aja, gak pada lapor LHKPN," sindirinya.

Sementara @RustamIbrahim mengajak warganet memperhatikan data KPK sebagai bahan pertimbangan memilih nanti. "Di hari pencoblosan 17 April 2019 minggu depan rakyatlah yang berkuasa. Saya usul jangan pilih seluruh Caleg yang tidak melaporkan harta kekayaan (LHKPN)," ajak dia diamini @Rezaldria. "Tidak tahu diri dan tidak tahu malu."

Tweeps @WikiWik8 meminta KPK menerapkan asas pembuktian terbalik. "Terapkan Pembuktian terbalik dong, harta para pejabat setelah purna tugas," sarannya disambut imbauan @jackjaloe. "Seyogyanya elite-elite ini memberikan contoh yang baik bagi semua warga

negara. Masihkah anda percaya dengan elit di Senayan dan calon elit yang hendak ke Senayan paska 17 april?"

Agak berbeda, tweeps @yaiaack berbaik sangka. "Mungkin juga karena masih sibuk kampanye, jadi belum sempat lapor," sahutnya.

Wakil Ketua Komisi II Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, LHKPN hanya wajib dilaporkan anggota Dewan tiap lima tahun sekali. "Pejabat publik itu punya kewajiban melaporkan LHKPN sebelum menjabat sampai dengan setelah menjabat dalam satu periode. Anggota DPR kan tiap 5 tahun, nanti dilaporkan," kata Riza kepada wartawan, kemarin.

Diakuinya, LHKPN berfungsi mengetahui kewajiban harta kekayaan yang dimiliki pejabat publik. Dia mengatakan hal itu bisa dilihat ketika anggota Dewan menyeterorkan laporan sebelum dan sesudah menjabat. ■ FAQ